

**PENGARUH KEJELASAN TUJUAN DAN DUKUNGAN ATASAN
TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH**

(Pada Dinas di Pemerintah Kota Padang)



Oleh:

CYNTIA CAROLINA

2009/98616

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013
Wisuda Periode September 2013**

**PENGARUH KEJELASAN TUJUAN DAN DUKUNGAN ATASAN
TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH**

(Studi Empiris pada Dinas di Pemerintah Kota Padang)

Oleh:

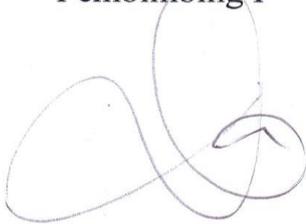
CYNTIA CAROLINA

NIM: 98616/2009

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/thesis untuk persyaratan wisuda periode
September 2013 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

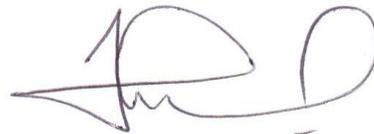
Padang, Agustus 2013

Pembimbing I



Deviani, SE, Ak, M.Si
NIP. 19690610 199802 2 001

Pembimbing II



Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19771123 200312 1 003

PENGARUH KEJELASAN TUJUAN DAN DUKUNGAN ATASAN TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

(Pada Dinas di Pemerintah Kota Padang)

Cyntia Carolina

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email: Carolinacyntia@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kejelasan Tujuan dan Dukungan Atasan terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas di Pemerintah Kota Padang. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Sampel penelitian ini diperoleh dari kepala sub bagian keuangan, bendahara pengeluaran, pembantu bendahara, bagian verifikasi, dan pemegang barang. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data penelitian diolah menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan tujuan berpengaruh signifikan positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, sedangkan dukungan atasan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Kata Kunci: Kejelasan Tujuan, Dukungan Atasan, Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Abstract

This study aims to determine how much influence the clarity of purpose and the usefulness Tops Support Systems at the Department of Regional Financial Accounting in Government of Padang. The sampling technique using total sampling. The study sample was obtained from the head of the finance sub-section, treasurer, vice treasurer, part verification, and the holder of the goods. Type of data used is primary data. Data were analyzed using multiple linear regression. The results showed that a significant purpose of clarity berpengaruh positively to the usefulness of financial accounting systems area, whereas no significant effect supervisor support positively to the usefulness of financial accounting systems area.

Keywords: *Clarity of Purpose, Support Tops, Usefulness of Regional Financial Accounting System.*

I. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi dalam menciptakan sebuah sistem yang *power share* pada setiap level pemerintahan, serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah. Dengan pemberian otonomi daerah pada kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk mengelola sistem dana secara desentralisasi dengan transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Adanya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Akan tetapi selain mempunyai kewenangan, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dayanya tersebut. Oleh karena itu sistem akuntansi menjadi tuntutan sekaligus kebutuhan bagi tiap pemerintah daerah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal.

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 yang kini telah diperbaharui oleh Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Proses akuntansi tersebut didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa sistem akuntansi sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan di daerah.

Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah meliputi: Validity, informasi yang dihasilkan dalam sistem akuntansi yang digunakan memiliki kandungan akurasi yang tinggi. Reliability, informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi adalah informasi yang dapat dipercaya. Efisien, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat menghemat penggunaan biaya dan kegunaan SAKD selanjutnya adalah Efektif, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat memanfaatkan waktu secara optimal.

Pada organisasi pemerintah daerah, sistem akuntansi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD selaku entitas akuntansi akan melaksanakan sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah dan prosedur akuntansi selain kas. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang digunakan pada saat sekarang ini adalah sistem akuntansi yang mengacu pada kebijakan perundangan yaitu Permendagri No. 13/2006 yang kemudian direvisi pada Permendagri No.59/2007 dan direvisi kembali pada Permendagri No.21/2011. Suatu keberhasilan penerapan sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun dari beberapa

penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan penerapan suatu sistem (Bodnar dan Hopwood : 2003). Agar dapat meningkatkan kegunaan SAKD ini maka perlu adanya faktor perilaku dalam suatu organisasi yang mendukung dalam penerapan SAKD tersebut (Latifah : 2007), diantaranya adanya kejelasan tujuan suatu organisasi serta adanya dukungan atasan dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah agar dapat meningkatkan kegunaan SAKD tersebut dalam memenuhi tuntutan masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas lembaga sektor publik, karena SAKD dapat berguna untuk mengelola dana secara transparan, ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel.

Menurut Robbins (2003) perilaku organisasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Penerapan SAKD merupakan bagian dari tujuan organisasi pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kejelasan tujuan dalam organisasi pemerintah dapat terlihat dari visi dan misi organisasi terkait. Apabila kejelasan tujuan organisasi yang berupa pelaksanaan SAKD tidak dijalankan secara tepat dan didukung secara aktif oleh atasan, maka penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak akan berguna karena kejelasan tujuan memperlihatkan transparansi di dalam sebuah organisasi, yang memperlihatkan alur yang harus dilalui atau dicapai seluruh anggota organisasi dalam bekerja. Kejelasan tujuan memperlihatkan keseriusan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Faktor perilaku selanjutnya dalam meningkatkan kegunaan dari penerapan SAKD adalah adanya dukungan atasan dalam organisasi. Menurut Shield (1995) dukungan manajemen puncak (atasan) dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya. Atasan dapat fokus terhadap sumber daya yang diperlukan, tujuan, dan inisiatif strategi yang direncanakan apabila atasan mendukung sepenuhnya dalam implementasi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Nurlaela (2010) yang meneliti mengenai faktor berperilaku organisasi seperti: Pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan di SUBOSUKAWONOSRATEN dengan menggunakan konflik koqnitif dan konflik afektif sebagai variabel intervening. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya. Pertama, dengan objek dan lingkungan yang berbeda dimungkinkan akan menunjukkan hasil yang berbeda pula. Kedua, penelitian ini melihat pengaruh kejelasan tujuan dan dukungan atasan secara langsung terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, sedangkan pada penelitian sebelumnya melihat pengaruh secara tidak langsung dengan menggunakan variabel intervening.

Peneliti mengambil sampel pada pemerintah Kota Padang karena penerapan prinsip-prinsip kelola keuangan sesuai sistem akuntansi yang ditetapkan oleh UU dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah di Kota Padang masih berjalan belum baik. Hal ini dikarenakan masih adanya dinas-dinas yang terlambat dalam penyusunan laporan keuangan daerahnya pada periode pelaporannya dan pada pengelolaan PAD masih banyak yang tidak memadai. Selanjutnya, menurut

Wakil Wali Kota Pemko Padang, Mahyeldi menyatakan bahwa masih adanya beberapa catatan yang perlu diperbaiki salah satunya masalah pencatatan asset (www.bpk.go.id). Pencatatan asset harus sesuai dengan SAP dan peraturan-peraturan yang ditetapkan agar penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan dalam meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah ini lebih lanjut pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kota Padang, dengan judul **“Pengaruh Kejelasan Tujuan dan Dukungan Atasan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah”**

II. TELAHAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

II.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Definisi Sistem Akuntansi Pemerintahan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Sementara itu dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Indra Bastian (2007) memandang sistem akuntansi keuangan pemerintah

daerah adalah proses atau prosedur baik itu dengan menggunakan metode manual ataupun secara terkomputerisasi. Prosedur yang dimaksud dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah daerah. Sedangkan menurut Nordiawan (2008), mendefinisikan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai berikut: “Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”. Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa SAKD merupakan suatu prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan dan juga untuk pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan daerah.

II.2 Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2004), SAKD dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya. Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Selanjutnya menurut Halim (2002), implementasi sistem akuntansi di daerah bisa dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Untuk kebutuhan pemerintah daerah itu sendiri
- 2) Untuk kebutuhan pemerintah yang lebih tinggi
- 3) Untuk kepentingan masyarakat umum

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat berguna untuk mengelola dana secara transparan, ekonomis, efektif efisien, dan akuntabel. Indikator yang digunakan dalam mengukur kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut diadopsi dari Nurlaela (2010) adalah sebagai berikut:

1. Validity, informasi yang dihasilkan dalam sistem akuntansi yang digunakan memiliki kandungan akurasi yang tinggi
2. Reliability, informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi adalah informasi yang dapat dipercaya
3. Efisien, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat menghemat penggunaan biaya
4. Efektif, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat memanfaatkan waktu secara optimal

II.3 Kejelasan Tujuan

Tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh tujuan dari anggota organisasi yang dominan, yang secara kolektif mempunyai kendali yang mencukupi atas sumber daya organisasi untuk membuat komitmen atas arah tertentu. Tujuan dipandang sebagai suatu kesepakatan yang kompleks, yang kadang kala mencerminkan kebutuhan individual dan tujuan pribadi yang saling bertentangan dari anggota organisasi yang dominan. Menurut Gibson (1993) dalam Latifah (2007), tujuan merupakan apa yang ingin dicapai oleh seseorang atau organisasi. Kejelasan tujuan dalam suatu organisasi

dapat menentukan suatu keberhasilan sistem, karena individu dengan suatu kejelasan tujuan akan lebih dapat memahami bagaimana cara mereka dalam mencapai target untuk mencapai tujuan dengan menggunakan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki.

Menurut Robbins (2003) kejelasan tujuan dalam organisasi pemerintah dapat terlihat dari visi dan misi organisasi terkait. Kegunaan SAKD merupakan bagian dari tujuan organisasi pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Menurut Handoko (2001) kejelasan tujuan memperlihatkan transparansi di dalam sebuah organisasi, yang memperlihatkan alur yang harus dilalui atau dicapai seluruh anggota organisasi dalam bekerja. Kejelasan tujuan memperlihatkan keseriusan organisasi dalam mencapai visi demi terjaganya eksistensi organisasi dimasa depan. Untuk mengukur kejelasan tujuan maka digunakan indikator yang diadopsi dari Nurlaela (2010) yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi sasaran yaitu keterbukaan di dalam perusahaan kepada setiap anggota organisasi tentang adanya sebuah tujuan yang harus dicapai
2. Perencanaan yaitu rangkaian kegiatan atau prosedur yang dapat dilakukan karyawan dalam mencapai tujuan
3. Target yaitu standar sasaran yang dibebankan kepada masing-masing anggota organisasi
4. Pengawasan yaitu proses pengamatan yang dilakukan manajemen terhadap anggota organisasi dalam mencapai tujuan
5. Sanksi yaitu hukuman yang diberikan kepada karyawan yang tidak bekerja sesuai dengan

prosedur atau standar yang diharuskan perusahaan.

II.4 Dukungan Atasan

Menurut Nasution, 1994 dalam Latifah (2007), dukungan atasan dapat diartikan sebagai keterlibatan atasan dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Atasan dapat focus terhadap sumber daya yang diperlukan, tujuan dan inisitif strategi yang direncanakan apabila atasan mendukung sepenuhnya dalam implementasi.

Menurut Ikhsan (2005), dukungan manajemen puncak/atasan merupakan suatu factor penting yang menentukan efektifitas penerimaan sistem informasi dalam organisasi. Beberapa alasan mengapa keterlibatan manajemen puncak dalam pengembangan sistem merupakan hal yang penting, yaitu: Pengembangan sistem merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan. Manajemen puncak (atasan) mengetahui rencana perusahaan sehingga sistem yang dikembangkan seharusnya sesuai dengan rencana perusahaan dan dengan demikian sistem yang baru akan mendorong tercapainya tujuan perusahaan.

Menurut Dessler (2008) sebuah organisasi dapat dikatakan solid bila terjadi hubungan dinamis antara karyawan dengan karyawan lain, serta hubungan yang harmonis antara karyawan dengan atasan. Kegiatan atau perilaku bekerja yang saling mendukung antara satu dengan yang lain akan membentuk kerja sama tim yang solid sehingga tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dapat direalisasikan dengan baik. Untuk mengukur dukungan atasan maka digunakan indicator yang diadopsi dari Nurlaela (2010) yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi atasan dalam bekerja, merupakan tindakan nyata dari

atasan yang ikut bekerja bersama sama anggota organisasi lainnya.

2. Motivator yaitu mendorong bawahannya untuk dapat mencapai sasaran yang telah disepakati
3. Reward yaitu penghargaan yang diberikan atasan ketika bawahannya dapat mencapai sasaran atau target yang direncanakan

II.5 Tinjauan Literatur

Penelitian Latifah (2007) tentang faktor berperilaku organisasi yang meliputi pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan dalam implementasi sistem akuntansi keuangan daerah, pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa hanya dukungan atasan yang berpengaruh positif untuk meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Sedangkan dua faktor berperilaku lainnya yaitu pelatihan dan kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berhasil dibuktikan karena tidak mencapai tingkat signifikansi.

Penelitian yang sama, dilakukan oleh Nurlaela (2010) pada Pemerintah daerah Subosukawonosraten. Hasil penelitiannya menunjukkan hubungan positif antara dukungan atasan dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan dari hubungan negatif antara pelatihan dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hal yang sama juga dilihat dari hasil pengujian kejelasan tujuan dengan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, karena nilai critical ratio (CR) menunjukkan nilai yang negatif.

Penelitian oleh Riyanita (2012) tentang pengaruh pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah pada kabupaten 50 Kota dan

Kota Payakumbuh menunjukkan bahwa hanya kejelasan tujuan yang berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Penelitian oleh Yuliana (2012) tentang faktor berperilaku organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah pada Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa hanya kejelasan tujuan yang berpengaruh signifikan positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

II.6 Kerangka Konseptual

Kejelasan tujuan dalam organisasi pemerintah dapat terlihat dari visi dan misi organisasi terkait. Kegunaan SAKD merupakan bagian dari tujuan organisasi pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Apabila kejelasan tujuan yang berupa pelaksanaan SAKD tidak dijalankan secara tepat maka kegunaan dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak akan terwujud. Disamping itu, kejelasan tujuan juga merupakan suatu teknik yang ampuh untuk memotivasi karyawan apabila kejelasan tujuan dapat digunakan secara tepat, dimonitor secara hati-hati dan didukung secara aktif oleh atasan, maka kejelasan tujuan dapat meningkatkan hasil dan tujuan yang diinginkan. Kejelasan tujuan dalam suatu organisasi dapat menentukan suatu keberhasilan sistem, karena individu dengan suatu kejelasan tujuan akan lebih dapat memahami bagaimana cara mereka dalam mencapai target untuk mencapai tujuan dengan menggunakan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki.

Dukungan atasan dapat diartikan sebagai keterlibatan atasan dalam kemajuan proyek dan menyediakan

sumber daya yang diperlukan. Atasan dapat focus terhadap sumber daya yang diperlukan, tujuan dan inisiatif strategi yang direncanakan apabila atasan mendukung sepenuhnya dalam implementasi. Dukungan atasan sangat penting dalam meningkatkan kegunaan dari penerapan suatu sistem, terutama dalam situasi inovasi dikarenakan adanya kekuasaan atasan terkait sumber daya yang diperlukan, tujuan dan inisiatif strategi yang direncanakan apabila atasan mendukung sepenuhnya dalam penerapan sistem baru. Dukungan atasan memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan kegunaan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, jika di suatu instansi pemerintahan tidak adanya dukungan atasan maka sistem yang akan dikembangkan tidak akan sesuai dengan rencana instansi dan dengan demikian tujuan instansi pemerintahan tidak akan tercapai.

II.7 Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut :

H₁: Kejelasan tujuan berpengaruh signifikan terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

H₂: Dukungan atasan berpengaruh signifikan terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

III. METODE PENELITIAN

III.1 Populasi dan Sampel

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi penelitian ini adalah Dinas di pemerintah Kota Padang. Dengan mengambil sampel secara total sampling dimana semua populasi dijadikan sampel karena jumlahnya kurang dari 100. Responden penelitian ini adalah kepala sub bagian keuangan, bendahara pengeluaran, pembantu bendahara, bagian verifikasi, dan pemegang barang. Jenis data dalam

penelitian ini adalah data subjek. Data yang digunakan merupakan data primer. Data tersebut bersumber dari kuesioner yang disebarkan secara langsung ke alamat responden, demikian pula pengembaliannya dijemput sendiri sesuai dengan janji yang dibuat dengan responden.

III.2 Instrumen Penelitian

Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Instrument yang digunakan untuk mengukur Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terdiri dari delapan item pertanyaan yang mengacu pada Robbins (2005). Skala likert 1-5 digunakan untuk mengukur respon dari responden.

Kejelasan Tujuan

Instrument yang digunakan untuk mengukur Kejelasan Tujuan terdiri dari sepuluh item pertanyaan yang mengacu pada Dessler (2008). Skala likert 1-5 digunakan untuk mengukur respon dari responden.

Dukungan Atasan

Instrument yang digunakan untuk mengukur Dukungan Atasan terdiri dari enam item pertanyaan yang mengacu pada Nurlaela (2010). Skala likert 1-5 digunakan untuk mengukur respon dari responden.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV.1 Gambaran Umum

Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 16 Dinas pada Pemerintah di Kota Padang. Peneliti menjadikan seluruh populasi sebagai sampel (*total sampling*) karena jumlahnya tidak melebihi dari 100 subjek. Setiap sampel masing-masing terdiri dari lima responden yaitu Kepala Sub Bagian Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara, Bagian

Verifikasi, dan Pemegang Barang, direncanakan pada setiap Dinas diberikan lima kuesioner, sehingga jumlah kuesioner yang rencana akan disebarkan 80 kuesioner. Namun, pada kenyataannya ada Dinas yang hanya bisa mengisi 2 kuesioner yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, 3 kuesioner yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum, dan terdapat juga Dinas yang menolak untuk mengisi kuesioner karena alasan sedang sibuk yaitu Dinas Pendidikan sehingga tidak memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian. Akhirnya kuesioner yang disebarkan berjumlah 70 kuesioner.

IV.2 Analisis Data

Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N = 70$ adalah 0,198. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing item variabel X_1 , X_2 dan Y semuanya di atas r_{tabel} . Maka dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan variabel X_1 , X_2 dan Y adalah valid.

Dari Tabel tersebut dapat dilihat nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrumen. Untuk instrumen Kejelasan Tujuan diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,275, untuk instrumen Dukungan Atasan nilai terkecil 0,483 dan untuk instrumen Kegunaan SAKD nilai terkecil 0,449.

Uji Reliabilitas

Untuk uji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam

kisaran 0,7 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik.

Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan *Cronbach's Alpha* yang terdapat pada tabel di atas yaitu untuk instrumen Kegunaan SAKD (Y) 0,838, untuk instrumen Kejelasan Tujuan (X_1) 0,815 dan untuk instrumen Dukungan Atasan (X_2) 0,783. Data ini menunjukkan nilai berada pada kisaran diatas 0,6, dengan demikian semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,952 dengan signifikan 0,325. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut.

Dari hasil uji multikolinearitas diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan *tolerance value* berada diatas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi.

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas, dapat dilihat tidak ada variabel yang signifikan dalam regresi dengan variabel AbsUt. Tingkat signifikansi $> \alpha$ 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Untuk mengungkap pengaruh variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis regresi berganda. Model ini digunakan terdiri dari dua variabel bebas yaitu Kejelasan Tujuan (X_1) dan Dukungan

Atasan (X_2) dan satu variabel terikat yaitu Kegunaan SAKD (Y). Hasil pengolahan data yang menjadi dasar dalam pembentukan model penelitian ini adalah sebagai berikut

$$Y = 14,286 + 0,414X_1 + 0,106X_2 + e$$

Dalam hal ini:

$$Y = 14,286$$

$$X_1 = 0,414$$

$$X_2 = 0,106$$

Uji Statistik F

Apabila signifikansi F lebih kecil dari derajat signifikansi, maka persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan. Berdasarkan uji F yang dilakukan dapat dilihat bahwa signifikansi adalah 0,000 atau kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa persamaan regresi yang digunakan sudah *fix*.

Koefisien Determinasi

Dari hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,244. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel Kejelasan Tujuan dan Dukungan Atasan adalah sebesar 24,4%, sedangkan 75,6% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada uraian berikut ini:

a. Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha$ 0,05. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,003 < \alpha$ 0,05 dan nilai t_{hitung} $3,059 > t_{tabel}$ 1,667. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 0,414. Jadi hipotesis yang telah

dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H_1 dapat diterima. Dimana semakin tinggi tingkat Kejelasan Tujuan maka semakin tinggi pula tingkat Kegunaan SAKD. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa Kejelasan Tujuan (X_1) berpengaruh signifikan positif terhadap Kegunaan SAKD. Dengan demikian Hipotesis pertama (H_1) **Diterima**.

b. Dari pengujian hipotesis yang kedua ditemukan bahwa Dukungan Atasan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kegunaan SAKD, ditunjukkan dari nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,561 < 1,667$ dan nilai signifikan sebesar $0,577 > 0,05$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dukungan Atasan tidak berpengaruh terhadap Kegunaan SAKD. Dengan demikian Hipotesis pertama (H_2) **Ditolak**.

IV.3 Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kejelasan Tujuan berpengaruh signifikan positif terhadap Kegunaan SAKD. Semakin tinggi Kejelasan Tujuan maka Kegunaan SAKD juga akan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Riyanita (2012) yang berjudul Pengaruh Kejelasan Tujuan dan Dukungan Atasan terhadap Kegunaan SAKD studi empiris pada Kabupaten 50 kota dan Kota Payakumbuh yang menyatakan bahwa Kejelasan Tujuan berpengaruh signifikan positif terhadap Kegunaan SAKD. Begitu juga dengan hasil penelitian Yuliana (2012) yang menyatakan hubungan signifikan positif Kejelasan Tujuan terhadap Kegunaan SAKD.

Menurut Gibson (1993) dalam Latifah (2007), tujuan merupakan apa yang ingin dicapai oleh seseorang atau organisasi. Kejelasan tujuan dalam suatu organisasi dapat menentukan

suatu keberhasilan sistem, karena individu dengan suatu kejelasan tujuan akan lebih dapat memahami bagaimana cara mereka dalam mencapai target untuk mencapai tujuan dengan menggunakan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki. Robbins (2003) kejelasan tujuan dalam organisasi pemerintah dapat terlihat dari visi dan misi organisasi terkait. Kegunaan SAKD merupakan bagian dari tujuan organisasi pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Menurut Handoko (2001) kejelasan tujuan memperlihatkan transparansi di dalam sebuah organisasi, yang memperlihatkan alur yang harus dilalui atau dicapai seluruh anggota organisasi dalam bekerja. Kejelasan tujuan memperlihatkan keseriusan organisasi dalam mencapai visi demi terjaganya eksistensi organisasi dimasa depan. Berdasarkan data distribusi frekuensi variable Kejelasan Tujuan dapat dilihat bahwa tingkat capaian responden sebesar 88,57% berada dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki kejelasan tujuan yang dapat meningkatkan Kegunaan SAKD.

Dari hasil analisis data statistik Dukungan Atasan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kegunaan SAKD. Hal ini berarti bahwa hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang penulis kemukakan sebelum dilakukannya penelitian. Dilihat dari distribusi frekuensi menunjukkan nilai rata-rata TCR sebesar 87,67%. Meski diketahui bahwa nilai dari TCR Dukungan Atasan dikategorikan baik tetapi hipotesis kedua dari penelitian ini ditolak, dimana Dukungan Atasan tidak dapat mempengaruhi Kegunaan SAKD. Hasil pengujian ini sejalan dengan hasil penelitian Riyanita (2012) dan Yuliana (2012) yang menyatakan bahwa Dukungan Atasan tidak berpengaruh signifikan positif

terhadap Kegunaan SAKD. Namun, hasil pengujian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Latifah (2007) dan Nurlaela (2010) yang menunjukkan bahwa Dukungan Atasan berpengaruh signifikan terhadap Kegunaan SAKD.

Jika dilihat dari pengertian sistem, setiap sistem memiliki tujuan, entah hanya satu ataupun banyak, tujuan inilah yang mengarahkan sistem, tanpa tujuan sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali (Abdul Kadir : 2003). Berdasarkan pengertian sistem tersebut Dukungan Atasan tidak menjadi faktor utama dalam peningkatan Kegunaan SAKD, melainkan dengan adanya kejelasan tujuan dalam organisasi dalam menerapkan SAKD telah dapat menjadi arah dan pengendali dalam keberhasilan penerapan SAKD tersebut.

Otley (1980) dalam Nurlaela (2010), menyatakan Teori Kontinjensi didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem yang secara universal selalu tepat diterapkan pada seluruh organisasi pada setiap keadaan, tetapi sistem akuntansi tersebut tergantung pada faktor-faktor situasional. Berdasarkan pada *Contingency Theory*, dapat dikatakan bahwa keberhasilan implementasi sistem akuntansi, tergantung pada kondisi Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Pendekatan *kepemimpinan situasional* menekankan bahwa kepemimpinan terdiri atas *dimensi pengarahan* dan *dimensi dukungan*. Setiap dimensi harus diterapkan secara tepat dengan memperhatikan situasi yang berkembang. Guna menentukan apa yang dibutuhkan oleh situasi khusus, pemimpin harus mengevaluasi bawahan dan menilai seberapa kompeten dan besar komitmen bawahan atas pekerjaan yang diberikan. Atasan perlu mulai menunjukkan perilaku dukungan jika atasan telah menyediakan pengarahan,

mengupayakan komunikasi dua-arah, dan membantu membangun motivasi dan rasa percaya diri bawahan. Gaya kepemimpinan ini muncul apabila *kesiapan* bawahan dalam melakukan pekerjaan meningkat, sehingga atasan perlu terus menyediakan sikap membimbing akibat bawahan belum siap mengambil tanggung jawab penuh atas pekerjaan. Namun berdasarkan fakta dilapangan atasan belum menyediakan pengarahan yang baik, belum memaksimalkan komunikasi dua-arah, dan belum optimal dalam membangun motivasi dan rasa percaya diri bawahan sehingga *kesiapan* bawahan dalam melakukan pekerjaan masih rendah, dan pada dimensi ini bawahan lebih membutuhkan arahan dan bukan dukungan, hal ini yang menyebabkan Dukungan Atasan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kegunaan SAKD di Dinas pada Pemerintah Kota Padang.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil pengolahan data dan pembahasan terhadap hasil penelitian Pengaruh Kejelasan Tujuan dan Dukungan Atasan terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejelasan Tujuan berpengaruh signifikan positif terhadap Kegunaan SAKD pada Dinas di Pemerintah Kota Padang.
2. Dukungan Atasan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kegunaan SAKD pada Dinas di Pemerintah Kota Padang

Keterbatasan

Penelitian ini hanya menguji pengaruh faktor perilaku organisasi yang meliputi Kejelasan Tujuan dan Dukungan Atasan terhadap kegunaan

SAKD, dari hasil uji koefisien determinasi terlihat bahwa pengaruh Kejelasan Tujuan dan Dukungan Atasan terhadap kegunaan SAKD hanya sebesar 22,1%, sedangkan 77,9% dipengaruhi oleh variabel lain.

Saran

Berdasarkan pada keterbatasan di atas, maka peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti variabel-variabel lain yang mempengaruhi keberhasilan penerapan suatu sistem, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jawad (1997) tentang faktor-faktor yang menentukan kesuksesan implementasi sistem menunjukkan bahwa ada beberapa factor yang berpengaruh seperti faktor teknologi, factor manajemen, factor manusia, dan factor eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Faisal, 2005, I Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Edisi Kedua Cetakan Kelima: Penerbitn Universitas Muhammadiyah
- Alam, S. 2004. *Akuntansi SNA kelas XI*. Jakarta : Erlangga
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. 2010. Opini LKPD di Wilayah Propinsi Sumatera Barat.
- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Sektor Akuntansi Publik*, Buku 2. Jakarta : Salemba Empat
- Bodnar, G.H & William, S. Hopwood. 2003. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: PT Indeks
- Dessler garry. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Indonesia. Jakarta: Erlangga
- Fitriyah, Lailatul. 2010. Efektifitas Pelatihan “Effectivecommunication” terhadap Kinerja Karyawan PT.ECCO Indonesia.*Jurnal*
- Gibson, Ivancevist, dan Donnelly. 1993. *Organisasi Perilaku: Struktur dan Proksi Edisi 5*. Jakarta : Erlangga
- Gibson, Ivancevist, dan Donnelly. 2005. *Organisasi Perilaku*. Jakarta : Erlangga
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE: Yogyakarta
- Halim, Abdul. 2003. *Akuntansi dan Pengendalian Daerah*. Yogyakarta : UMP AMP YPKN
- Handoko, Hani. (2001). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Edisi 2. BPFE. Yogyakarta
- Hendriksen, M.C. 2005. *Accounting Theory*, Ed. New Jersey: Person Education, Inc.
- Hidayat, Heri. 2008. *Analisis Implikasi Ketidaksesuaian Rancangan SSistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIKPD) Way KAnan dengan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan*. Thesi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Ikhsan, Arfan dan Ishak Muhammad. 2005. *Akuntansi Keprilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.

- Ikhsan, Arfan dan M.Ishak. 2005. *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat
- Kadir, Abdul. 2003. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta:ANDI
- Latifah, Lyna dan Sabeni Arifin. 2007. *Faktor Keperilakuan Organisasi dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Jurnal SNA X : Universitas Diponegoro
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta
- Midjan, La dan Azhar Susanto (2001). *Sistem Informasi Akuntansi I*, Bandung: Informatika Akuntansi
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga. Jakarta : Salemba Empat
- Nordiawan, Deddi. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Nurdin, Diana. 2012. *Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Skripsi. Padang : Universitas Bung Hatta
- Nurlaela, Siti dan Rahmawati. 2010. *Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Subosukawonosraten*. Jurnal SNA XIII
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 *tentang Akuntansi Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Puspita, Winda. 2011. *Analisa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada badan Kepegawaian Daerah Kota Padang*. Skripsi. Padang : Universitas Andalas
- Republik Indonesia. Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah Republik Indonesia*
- Republik Indonesia. Undang-undang RI No. 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Pusat dan Pemerintah Daerah Republik Indonesia*
- Republik Indonesia. Undang-undang RI No.17 Tahun 2003 *tentang Keuangan negara Republik Indonesia*
- Riyanita, Risyia. 2012. *Pengaruh Pelatihan, Kejelasan Tujuan, dan Dukungan Atasan terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Skripsi. Padang : Universitas Bung Hatta
- Robbins, P.Stephen. 2003. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT Indeks
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Bussiness II*. Jakarta : Salemba Empat
- Shield, M. D., and S.M Young. (1995). *Behavioral Model for*

Implementing Cost Management System. Journal of Cost Management (Winter), 17:25

Suwardjono. 2005. *Perekayasaan Akuntansi Keuangan.* BPFE: Yogyakarta

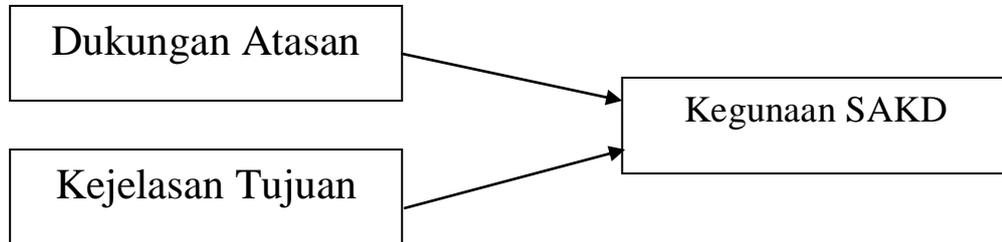
Tim Pokja. 2001. *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Tim Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah* : Jakarta

Wibisono, Dermawan. 2006. *Manajemen Kinerja.* Jakarta : Erlangga

Yuliana, Risna. 2012. *Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.* Skripsi. Padang : Universitas Bung Hatta

LAMPIRAN

Gambar 1
Kerangka Konseptual



Tabel 1

Daftar Nama Dinas-Dinas di Pemerintah kota Padang

No	Nama Dinas	Alamat
1	Dinas Pendidikan	Gedung Bagindo Aziz Chan
2	Dinas Kesehatan	Jln. Kesehatan, Dadok Tunggul Hitam
3	Dinas Pekerjaan umum	Jln. Ujung Gurun No. 2
4	Dinas kebersihan dan Pertamanan	Jln. Simpang Rambutun Balai Baru
5	Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan	Jln. Jenderal Sudirman No. 4A
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Jln. Sudirman No.1
7	Dinas Koperasi UMKM	Jln. Ujung Gurun No. 3
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	Jln. Batang Rokan No.1 Komp. GOR H. Agus Salim
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jln. Samudera No. 1
10	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Jln. Sutan Syahrir Mata Air
11	Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan	Sungai Lareh, Lubuk Minturun
12	Dinas Perindustrian, perdagangan, dan Pertambangan Energi	Jln. Khatib Sulaiman No. 67

13	Dinas Kelautan	Jln. Samudera No. 1
14	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Jln. Rasuna Said No. 73
15	Dinas Pasar	Kompl.Atom Shopping Centre Lantai 2
16	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jln. Prof.H.M. Yamin No. 70

Tabel 2
Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah kuesioner
Jumlah kuisisioner yang disebar	80
Jumlah kuisisioner yang kembali	70
Jumlah kuisisioner yang diolah	70
Respon rate	87,5 %

Tabel 3
Uji Validitas
Nilai *Corrected Item-Total Correlation* Terkecil

Instrumen Variabel	Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> terkecil
Kegunaan SAKD (Y)	0,449
Kejelasan Tujuan (X ₁)	0,275
Dukungan Atasan (X ₂)	0,483

Tabel 4
Uji Reliabilitas
Nilai *Cronbach's Alpha*

Instrumen Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>
Kegunaan SAKD (Y)	0,838
Kejelasan Tujuan (X ₁)	0,815
Dukungan Atasan (X ₂)	0,783

Tabel 5
Uji Normalitas Residual

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.69083290
Most Extreme Differences	Absolute	.114
	Positive	.114
	Negative	-.084
Kolmogorov-Smirnov Z		.952
Asymp. Sig. (2-tailed)		.325

a. Test distribution is Normal.

Tabel 6
Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	14.286	4.573		3.124	.003		
Kejelasan Tujuan	.414	.135	.437	3.059	.003	.553	1.807
Dukungan Atasan	.106	.189	.080	.561	.577	.553	1.807

a. Dependent Variable: Kegunaan SAKD

Tabel 7
Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.244	2.897		-.429	.669
Kejelasan Tujuan	.039	.086	.074	.455	.650
Dukungan Atasan	.060	.120	.081	.498	.620

a. Dependent Variable: ABS_RES

Tabel 8
Uji Model atau Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	161.200	2	80.600	10.809	.000 ^a
	Residual	499.600	67	7.457		
	Total	660.800	69			

a. Predictors: (Constant), Dukungan Atasan, Kejelasan Tujuan

b. Dependent Variable: Kegunaan SAKD

Tabel 9
Adjust R Square

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.494 ^a	.244	.221	2.731

a. Predictors: (Constant), Dukungan Atasan, Kejelasan Tujuan

Tabel 10
Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	14.286	4.573		3.124	.003
Kejelasan Tujuan	.414	.135	.437	3.059	.003
Dukungan Atasan	.106	.189	.080	.561	.577

a. Dependent Variable: Kegunaan SAKD